Geospasial.

22. Urusan Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di Pemda DIY meliputi:

a. Counter Surveillance (pengamanan ruangan) ruang kerja dan ruang rapat di lingkungan Pemda DIY.
b. Signal Jamming (pengacakan sinyal) pada pelaksanaan event tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY
c. Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenskripsi).
d. Fasilitasi layanan encrypted email atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan.
e. Pengelolaan telepon berbasis Voip untuk instansi di lingkungan Pemda DIY
f. Pengelolaan Frekuensi UHF untuk penunjang komunikasi di lingkunganPemda DIY
g. Fasilitasi Pengecekan spectrum peralatan sandi milik provinsi dan Kabupaten/Kota

23. Urusan Perpustakaan

Target Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2019 ini ditetapkan sebesar 24%. Realisasi hingga tahun 2019, terdapat 793.695 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk berusia produktif (dalam hal ini berusia 5-65 tahun) di DIY pada tahun 2019 menurut data proyeksi dari BPS adalah terdapat sebanyak 3.196.500 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2019 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk berusia produktif pada tahun (2019) dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 24,83%.

Faktor yang mendorong dan mendukung capaian kinerja tahun 2019 salah satunya adalah publikasi yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pameran, liputan media massa seperti radio maupun media elektronik, Billboard, dan juga social media sehingga target kinerja tahun 2019 dapat terealisir. Di samping itu juga terdapat Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi yang tersebar di kabupaten/kota. Layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat yaitu: RSUP Dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU. Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pajak Pratama.

Layanan perpustakaan pada Balai Layanan Perpustakaan salah satunya ada di Gedung Ghratama Pustaka (GTP) yang menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti Layanan Koleksi Buku Anak, Layanan Koleksi Buku Braile, Layanan Koleksi Umum, Layanan Referensi Umum, Layanan Koleksi Digital, Layanan Koleksi Buku Langka, Layanan Koleksi Deposit dan. Di Unit Jogja Library Center (JLC), disediakan Jenis layanan Yogyasiana, Majalah dan Surat Kabar, Kyoto Corner,Internet, Audio Visual dan Center of Excelent (CoE) Budaya Jawa.Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon selain menyediakan buku juga menyediakan kegiatan interaktif yaitu Perpustakaan Kanak-Kanak, Mendongeng, Wisata Pustaka, Internet, Permainan Edukatif, dan Peningkatan Kreatifitas.

24. Urusan Kearsipan

Gambar Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2019

Sumber: DPAD DIY, 2019 (Diolah)

Jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2019 sebesar 6.605 berkas dari target yang dicanangkan pada tahun 2019 sebesar 6.300 berkas. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2019 ini adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat/ lembag adalam menyerahkan arsipnya ke DPAD DIY selaku LKD Provinsi sehingga target kinerjatahun 2019 dapat dicapai dengan baik. Hal ini didukung oleh sosialisasi yang terus digalakkan melalui kegiatan promosi dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan melalui pameran arsip. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2019 ini adalah adanya publikasi, promosi, dan sosialisasi yang dilaksanakan melalui Pameran arsip, penerapan SIKS dan juga adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip sehingga target kinerja tahun 2019 dapat dicapai dengan baik.

Pameran arsip pada tahun 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali dengan tema yang berbeda. Pameran pertama bertema "Daulat Rakyat Yogyakarta, Cermin Demokrasi Indonesia Melalui Penyelenggaraan Pemilu di Yogyakarta" yang dilaksanakan pada tanggal 18-24 Juli 2019 bertempat di Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan Yogyakarta. Pameran kedua bertema "Sri Sultan Hamengku Buwono I: Menghadang Gelombang, Menantang Zaman" yang dilaksanakan pada tanggal 1-9 November 2019 bertempat di Bale Angun-angun Sitihinggil, Kraton Yogyakarta.

25. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Produksi perikanan DIY, baik budidaya maupun tangkap cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan budidaya yang mendominasi hasil perikanan di DIY bahkan selama 5 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Sesuai dengan RPJMD 2017-2022 pada tahun 2019 kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan. Dari indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat bahwa Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 12,44%, sedangkan perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar - 1,96% dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung dan perijinan kapal yang sulit.

26. Urusan Pariwisata

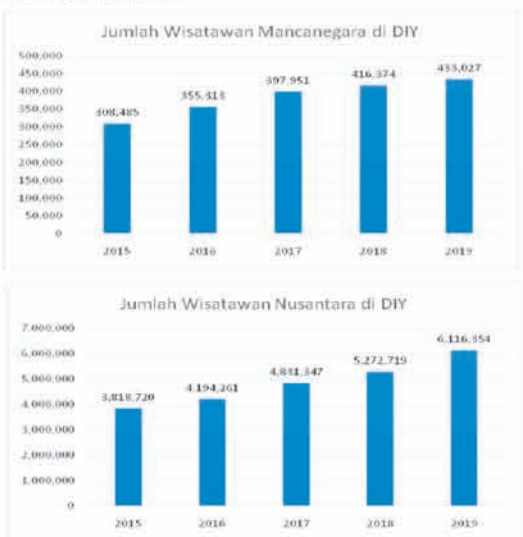

27. Urusan Pertanian

Nilai NTP tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dimana NTP tiap bulan pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding nilai NTP pada periode bulan yang sama di tahun 2018. Nilai NTP > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin tinggi.

Gambar Nilai Tukar Petani Tahun 2018 dan 2019

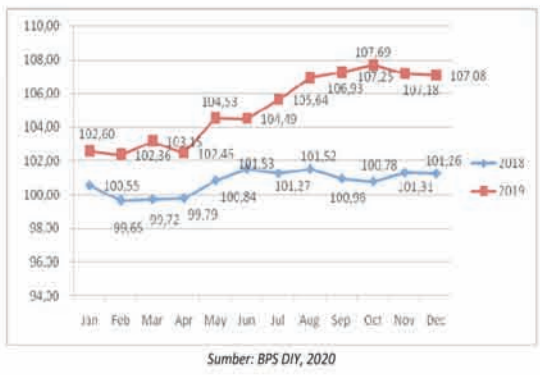

Sumber: BPS DIY, 2020

28. Urusan Kehutanan

Tabel Luas Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

Kabupaten	Hutan Negara(Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total Hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,00	9.630,18	9,87
Sleman	2.051,13	4.898.80	6.949,93	7,13
KulonProgo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39
Daerah Istimewa Yogyakarta	19.133,95	78.400,27	97.534,22	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah 97.534,22 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 78.400,27 ha. Dibandingkan dengan luas wilayahnya, luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai 30,61% sehingga secara teoritis luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mampu memberikan daya dukung terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Jenis vegetasi dominan adalah jati, kayu putih dan pinus yang berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

Pertumbuhan ekonomi dari sub sektor kehutanan masih didominasi oleh hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun dari hutan rakyat. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 di DIY mencapai 154.210,56 m3. Produksi kayu dari dalam Kawasan berhasil menyumbangkan PAD sebesar Rp. 997.595.888,-. Sub sektor kehutanan di DIY juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata melalui jasa lingkungan wisata alam. Jasa lingkungan wisata alam terus berkembang seiring dengan meningkatnya tren wisata alam di DIY. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan yang berasal dari jasa lingkungan wisata alam Mangunan, Klayar dan Ngingrong sebesar Rp. 2.454.374.875,- jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.260.603.250,-. Selain dari hasil hutan kayu pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan juga didukung oleh hasil hutan bukan kayu, yaitu produksi minyak kayu putih. Produksi minyak kayu putih pada tahun 2019 adalah sebesar 39.323 liter. Jumlah produksi minyak kayu putih di DIY mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2019

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.889.734.500

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022, sasaran Urusan ESDM adalah Meningkatnya Rumah Tangga berakses listrik dan meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan terhadap rencana tata ruang dengan 2 indikator sebagai berikut:

Gambar Capaian Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2019

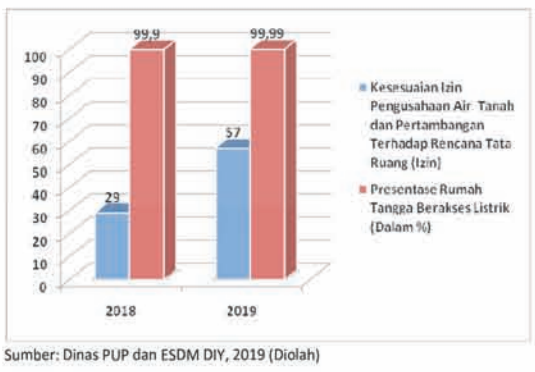

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2019 (Diolah)

Indikator prosentase rumah tangga berakses listrik diwujudkan melalui penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik. Sampai dengan tahun 2018, presentase rumah tangga berakses listrik sebesar 99,90% atau sejumlah 1.202.119 rumah tangga. Pada tahun 2019, dilakukan penambahan rumah tangga berlistrik sebesar 0,09% atau sejumlah 1.083 rumah tangga. Sehingga capaian prosentase rumah tangga berakses listrik pada akhir 2019 sebesar 99,99% atau 104,59% dari target tahun 2019.

30. Urusan Perdagangan

Pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, perdagangan luar negeri DIY menunjukkan trend positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,28%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 tercatat USD 370,22 Juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 9,53% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit (STK), Biji Vanila, Minyak Atsiri, STK Sintetis, Papan Kemas, Wigs (Rambut Palsu), Kerajinan Kertas, dan Kerajinan Kayu adalah komoditas utama ekspor DIY yang di ekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis, China dan Belgia. Perkembangan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta telah tertuang dan dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volume (Juta kg)	57,51	56,90	57,01	59,24	53,57	64,17
Nilai (Juta US $)	233,25	242,47	252,18	296,61	338,02	370,22
Komoditas	166	110	88	78	88	94
Negara	114	115	112	112	115	113
Eksportir	310	325	286	314	360	400

Sumber: Disperindag DIY, 2019

31. Urusan Perindustrian

Sector industry pengolahan memberikan kinerja yang positif pada tahun 2019. Hal ini ditandai dengan terlampauinya target indicator kinerjanya, yaitu nilai sektor industri dalam PDRB dengan capaian sebesar 100,45%. Target indicator nilai sektor industri dalam PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 13.143.131 Juta dengan realisasi sebesar Rp. 13.201.887 Juta. Peningkatan permintaan atas produk IKM DIY akibat maraknya bisnis online, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor memicu peningkatan kinerja sector industry. Pelaksanan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya juga memicu peningkatan kinerja sector industri. Penumbuhan dan pengembangan IKM dari pemerintah pusat dilakukan melalui Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

32. Urusan Transmigrasi

Program transmigrasi masih banyak diminati masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan model transmigrasi yang lebih modern, disamping menyediakan lahan juga perlu dikembangkan produk/komoditas unggulan dan pasarnya untuk menjamin kelangsungan usaha para transmigran. Pelaksanaan transmigrasi juga untuk percepatan pembangunan kawasan terluar dari Indonesia, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran keluar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

Grafik PemberangkatanTransmigran Ke Luar Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019

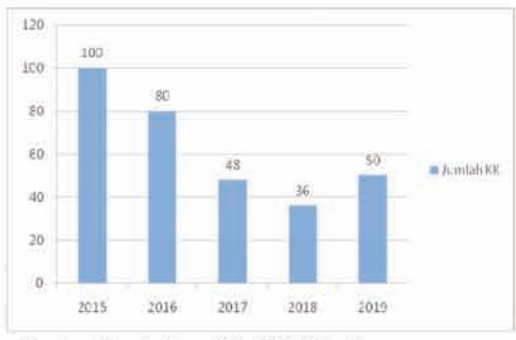

Sumber: Disnakertrans DIY, 2019 (Diolah)

Seperti pada tabel di atas terlihat pengiriman transmigran sampai tahun 2018 mengalami penurunan dan di tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan alokasi program transmigrasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan pemberangkatan transmigran melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP). Pemda DIY selama kurun waktu 2015-2019 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 314 KK dan pada tahun 2019 memberangkatkan sebanyak 50 KK ke 3 lokasi yaitu:

a) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 33 KK;
b) Kabupaten Konawe Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 KK;
c) Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 KK;

33. Urusan Kebudayaan

Kebijakan Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, dan Masyarakat. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program.

Program-program kegiatan inovatif yang dapat menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima), Jaga Warga, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Jogja Kota Batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, Diplomasi Budaya, Sekolah Basis Budaya, Anugerah Budaya, Event iconic kabupaten/kota dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutera) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di DIY.

Gambar Upacara Adat Lutukan Sunan Geseng

E. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

a. Pada tahun 2019, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 16A/LHP/XVIII.YOG/05/2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 16B/LHP/XVIII.YOG/05/ 2019 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut tela h sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesembilan kalinya.
b. Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, refocusing program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan, dan upaya crosscutting program kegiatan. Nilai AKIP DIY pada tahun 2019 diperoleh dari Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 90,19 dengan predikat "AA". Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Sebelumnya, Pemda DIY empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Capaian kinerja AKIP tahun 2019 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (performance based organization).

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan

Tabel Capaian Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan, 2018-2019

Indikator	Satuan	Capaian 2018	2019			Target 2022	Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase capaian Program Urusan Keistimewaan	%	100	73,91	96,15	130,09	91,30	105,31

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2019

Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan dalam kewenangan urusan kelembagaan diantaranya meliputi perumusan kebijakan hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintahan, penyusunan kajian naskah akademis di kabupaten/kota tentang kelembagaan kecamatan dan desa, upaya peningkatan budaya kerja pemerintahan (SATRIYA) dan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais Nomor. 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais Nomor. 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah.

Hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintah dimaksud, bertujuan mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antarlembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan. Sementara itu dalam penguatan bidang SDM aparatur Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota dilakukan dengan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA (Pergub DIY No. 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA) serta diklat keistimewaan bagi aparatur. Sosialisasi dan internalisasi dimaksud bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Diklat budaya juga diselenggarakan bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan nilai-nilai keistimewaan yaitu antara lain: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/ Kemantren). Penguatan Regulasi terkait penataan kelembagaan asli daerah melalui penetapan Pergub No 25 tahun 2019 yang menjadi dasar nama kecamatan di kabupaten berubah menjadi kapanewon, dan di kota berubah menjadi kemantren. Camat di kabupaten menjadi panewu dan di kota menjadi mantri pamong praja.Kemudian desa di kabupaten berubah menjadi kalurahan, dengan kepala kalurahan disebut lurah. Sementara untuk kelurahan di kota tidak mengalami perubahan nomenklatur baik di kelembagaan maupun jabatannya. Sejauh ini baru Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan perubahan nomenklatur dengan melantik ulang 87 kepala desa dan penjabat kepala desa menjadi lurah dan penjabat lurah. Kegiatan urusan kelembagaan ini didukung keberhasilan kegiatan perencanaan dan pengendalian keistimewaan, fasilitasi Paramparapraja, penyebarluasan informasi, pengelolaan SDM pengampu keistimewaan dan lain lain.

F. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan Pihak ketiga

Pada tahun 2019 telah melakukan 14 (empat belas) Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerja Sama antar daerah dan 9 (sembilan) Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur DIY dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo, dan Direktur PT. Bank BPD DIY. Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, KADIN DIY, UGM,UPN "Veteran" Yogyakarta, ITY, STIE YKPN Yogyakarta, Politeknik API Yogyakarta, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Solusi Transportasi Indonesia.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Gambar Trend Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019

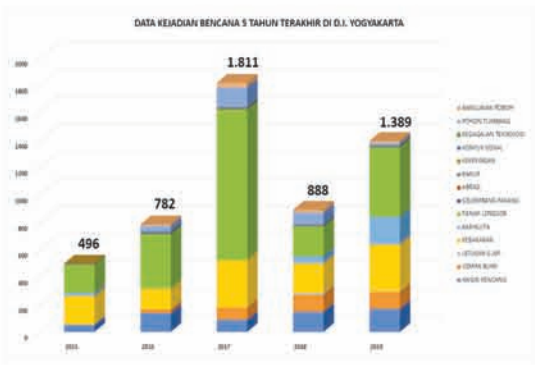

Langkah-langkah prioritas BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir risiko dengan meningkatkan ketahanan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui Destana/Katana dan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB);
2. Penguatan sistem peringatan dini baik yang berbasis masyarakat maupun teknologi pada wilayah rawan bencana melalui pembangunan dan pengembangan EWS/ Sistem Peringatan Dini terintegrasi;
3. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan melalui pengembangan pemanfaatan TI;
4. Menyusun kajian-kajian kebencanaan untuk pengurangan risiko;
5. Memberdayakan forum/jaringan/kemitraan antar-lembaga untuk pengurangan risiko bencana terutama melalui FPRB dan klaster-klaster PB;
6. Pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dan aman (build back better and safer) berbasis pengurangan risiko bencana.

3. Penyelenggaraan Tramtibum

Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian perseteruan antar umat beragama, antar suku antar etnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dengan pengusaha, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat, sehingga potensi konflik sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus diantisipasi sedini mungkin. Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pemda DIY bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, forum-forum kemitraan dan pihak kepolisian memaksimalkan program pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan lembaga organisasi yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pencegahan konflik sosial dapat diatasi bersama-sama.

G. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	LEBIH/KURANG	(%)
1	Pendapatan	5.713.924.265.502,71	5.699.328.932.440,50	(14.595.333.062,21)	99,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.015.621.583.744,71	2.082.767.034.434,50	67.145.450.689,79	103,33
1.2	Dana Perimbangan	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	(81.769.146.752,00)	96,69
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.230.830.622.753,00	1.230.858.985.753,00	28.363.000,00	100,00
	JUMLAH	5.713.924.265.502,71	5.699.328.932.440,50	(14.595.333.062,21)	99,74
2	BELANJA	5.978.131.574.404,65	5.544.876.462.030,02	(433.255.112.374,63)	92,75
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.167.243.978.527,01	3.032.231.305.746,71	(135.012.672.780,30)	95,74
2.2	Belanja Langsung	2.810.887.595.877,64	2.512.645.156.283,31	(298.242.439.594,33)	89,39
	JUMLAH	5.978.131.574.404,65	5.544.876.462.030,02	(433.255.112.374,63)	92,75
	SURPLUS/(DEFISIT)	(264.207.308.901,94)	154.452.470.410,48	418.659.779.312,42	(58,46)
3	PEMBIAYAAN	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	472.804.308.901,94	474.458.156.884,94	1.653.847.983,00	100,35
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	208.597.000.000,00	208.597.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	420.313.627.295,42	420.313.627.295,42	0,00

H. INOVASI DAERAH

Sepanjang tahun 2019 telah banyak diperoleh 102 penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, antara lain:

1) Pemerintah Daerah DIY ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai lokus pilot project untuk percepatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
2) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
3) Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menempatkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada predikat 'Sangat Inovatif' dengan indeks 11.460.
4) Terdapat 2 (dua) inovasi pelayanan publik Pemerintah Daerah DIY yang berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2019 tentang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yaitu :
   - Menggapai Mimpi Sahabat RIMBA Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Balai KPH Yogyakarta;
   - SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) – Balai Layanan Perpustakaan DIY.

   Kedua inovasi pelayanan publik tersebut terpilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) Tahun 2020.
5) Terdapat 1 (satu) inovasi pelayanan publik Pemerintah Daerah DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2019 tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yaitu SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) – Balai Layanan Perpustakaan DIY.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY tahun 2019 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten/ kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta, April 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X